



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penetapan, pengkajian, perekayasaan dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk merapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam produk atau proses produksi;
6. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah;
7. RoadMap Penguatan SIDA Kabupaten Lamongan adalah Dokumen yang berisi kebijakan umum dan program prioritas pembangunan dalam rangka Penguatan SIDA Kabupaten Lamongan untuk Periode Tahun 2023-2027.

BAB II
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 2

Roadmap Penguatan SIDA merupakan dokumen yang berisi kebijakan penguatan sistem inovasi di Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2027.

Pasal 3

RoadMap Penguatan SIDA Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan :

- a. salah satu pedoman perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan inovatif dan progresif; dan
- b. salah satu Pedoman Operasional bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023-2027.

Pasal 4

Isi dan Uraian RoadMap Penguatan SIDA Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Implementasi RPK	Jumlah RPK	0	0	20%	70%	100%		Bappelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
3.	3.1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Partisipasi Semua aktor dalam PSID	partisipasi masih rendah	Peningkatan jumlah anggota masyarakat dan interaksi antar anggota kelompok kreatif di RPK yang terorganisir secara sistemik.	Fasilitasi dalam inovasi pelayanan publik	% Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi dalam rangka melakukan inovasi pelayanan publik (gelar pameran pelayanan publik)	-	-	20%	40%	75%	Peningkatan Pelayanan Publik dan Partisipasi Semua aktor dalam PSID	Bappelitbangda, Bagian Perencanaan, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	3.2	Peningkatan Litbangyasa absorpsi untuk mendukung PSID	Peran Litbangyasa masih rendah	Peningkatan peran posyantik dan wartek secara optimal dalam pelayanan untuk meningkatkan kapasitas absorpsi IPTEKIN	Fasilitasi Posyantik dan wartek dalam inovasi pelayanan publik	% Jumlah unit pelayanan yang difasilitasi	20%	40%	75%	80%	90%	Peningkatan Peran Litbangyasa dalam absorpsi IPTEKIN untuk mendukung PSID	Bagian Organisasi, Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	4.1	Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan dasar, menengah, atas/kejuruan dan perguruan tinggi serta memberi apresiasi inovasi dan meningkatkan peran relawan berinovasi secara inklusif	Apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam berinovasi masih rendah	Peningkatan apresiasi terhadap kegiatan kreatif inovatif.	Apresiasi dalam inovasi kegiatan inovatif	% Jumlah kegiatan apresiasi inovatif masyarakat dalam 1 tahun	0	1	1	1	1	Peningkatan signifikan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan inovatif	Bappelitbangda, Dinas Pendidikan, Bagian Organisasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4.2	Pengembangan budaya dan pengembangan IPTIKININ yang semakin meluas	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi belum optimal	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan	% hasil penelitian yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan oleh stakeholders	25%	40%	50%	60%	70%	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin optimal	Bappelitbangda
5.	5.1	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan semakin optimal	Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan masih rendah	Program penerapan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan akuntabilitas kinerja aparat pemerintahan Peningkatan kinerja PD	% Target terpenuhinya kinerja % Target terpenuhinya kinerja	85%	100%	100%	100%	100%	Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang optimal	BAPPELITBANGDA Bagian Tata Pemerintahan,
6.	6.1	Peningkatan kesadaran lingkungan dan pemanfaatan HKI untuk PSID	Kesadaran terhadap pelestarian lingkungan dan pemanfaatan HKI untuk PSID masih rendah	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	% peningkatan partisipasi masyarakat kepedulian lingkungan	20%	40%	60%	80%	100%	Adanya peningkatan signifikan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Sumber Daya Alam
				Peningkatan kesadaran dan pentingnya HKI di masyarakat dan pemanfaatannya.	Peningkatan kesadaran dan pentingnya HKI	% peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan HKI	20%	40%	60%	80%	100%	Tersedianya fasilitas difabel dan kebijakan untuk meningkatkan kreativitas	Dinas Sosial

Pilar 2: Penguatan kluster industri ---> mengembangkan daya saing industri

Kerangka Kebijakan Inovasi	NO	SASARAN	KONDISI SAAT INI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					KONDISI YANG DIINGINKAN	ISTANSI PENANGGUNG JAWAB									
							2023	2024	2025	2026	2027											
1. Menata dan mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal dan perijinan	1.1	Program pengembangan kluster industri Maritim, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	belum adanya kluster industri yang terbangun	Pembangunan kluster industri yang mendukung PSID	Pembangunan kluster industri maritim untuk kapal niaga dan kapal rakyat	% Terwujudnya kluster industri kapal niaga	40%	60%	80%	90%	100%	Terwujudnya pembangunan kluster industri maritim sebagai inti program PSID	Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
							% Terwujudnya kluster industri kapal rakyat	10%	20%	60%	80%			100%								
								% Terwujudnya kluster industri pertanian	40%	60%	80%			90%	100%							
									% Terwujudnya kluster minapolitan	40%	60%			80%	90%	100%						
							% Terwujudnya kluster industri perikanan dan kelautan	10%		20%	60%			80%	100%	Terwujudnya minapolitan sebagai pendukung utama program PSID	Dinas Perikanan					
								% Terwujudnya kluster industri pariwisata	40%	60%	80%			90%	100%							
							Belum ada perubahan pada program hilirisasi industri untuk memperkuat program PSID		Program peningkatan hilirisasi industri	Hilirisasi industri	% peningkatan hilirisasi industri komponen maritim			5%	10%	15%	20%	25%	Program Hilirisasi industri yang optimal	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
								% peningkatan hilirisasi industri pengolahan produk pertanian						20%	25%	30%	40%	50%				
														% peningkatan hilirisasi industri perikanan	40%	50%	55%	60%			70%	
															% peningkatan hilirisasi industri pengolahan produk perikanan	5%	10%	20%			30%	40%
																% peningkatan hilirisasi industri pengolahan produk perikanan	0%	5%			10%	15%
							Belum ada program pemasaran kluster industri yang terpadu	Program pemasaran kluster industri	Program peningkatan pemasaran kluster industri	% Peningkatan pemasaran dan investasi di kluster industri	0%			5%	10%		15%	20%	Program pemasaran kluster industri yang optimal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
											0%			5%	10%	15%	20%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2. Memperkuat dan mengembangkan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEKIN) /atau penelitian, pengembangan dan perkerjasama (libangyasa) dan kemampuan absorpsi industri, IKM, atau khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), untuk memenuhi kebutuhan IPTEKIN strategis.	2.1	Penataan Kelembagaan Klaster Industri Maritim, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	Belum adanya kelembagaan pengelola klaster industri terpadu dan efisien	Program Penataan Kelembagaan Klaster Industri Maritim, Pertanian, dan Pariwisata manajemen	Program pembentukan kelembagaan badan pengelola kawasan klaster industri terpadu technopark	% capaian pembentukan badan pengelola klaster industri/ technopark	100%	40%	70%	100%	100%	Terbentuknya lembaga pengelola technopark/ klaster industri yang efisien	Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Perencanaan
	2.2	Penguatan Fungsi dan Peran Klaster Industri Maritim, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	Program penguatan klaster industri masih lemah	Program penguatan fungsi dan peran technopark/ klaster industri	Program Penguatan Fungsi Kelembagaan Technopark	% capaian target	0%	10%	20%	40%	60%	Fungsi penguatan kelembagaan yang handal	
	2.3	Program Pengembangan Pusat Informasi Klaster Maritim, Perikanan dan Pariwisata	Belum ada sistem pusat informasi terpadu klaster industri	program pembangunan pusat informasi klaster industri terpadu	Pembangunan platform pusat data informasi terpadu	% capaian target	0%	20%	60%	80%	100%	Pembangunan pusat informasi klaster industri yang terpadu dan efisien	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informasi
3. Menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi hasil libangyasa.	3.1	Peningkatan pasokan IPTeKIN dalam pengembangan Klaster Maritim, Perikanan dan Pariwisata	Rendahnya tingkat pemakaian IPTeKIN dalam industri	Program peningkatan pasokan IPTeKIN dalam mendukung program PSID	Pemilihan TTG sesuai dengan kebutuhan industri dan adaptasi pemakatan TTG	% capaian target	0%	20%	60%	80%	100%	Peningkatan pasokan IPTeKIN untuk pengembangan Klaster Industri yang efisien	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.2	Peningkatan Interaksi IPTeKIN dalam Klaster Industri, Perikanan dan Pariwisata	Rendahnya interaksi dengan IPTeKIN dalam industri	Program peningkatan interaksi IPTeKIN dalam mendukung program PSID	Peningkatan penguasaan teknologi	% capaian target	0%	20%	60%	80%	100%	Peningkatan Interaksi IPTeKIN dalam Klaster Industri agar tercipta sistem industri yang efisien	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.3	Peningkatan Daya Serap IPTeKIN di Klaster Industri Maritim, Perikanan dan Pariwisata	Rendahnya daya serap IPTeKIN di Industri	Program peningkatan tingkat penyerapan IPTeKIN	Peningkatan penyerapan teknologi	% capaian target	0%	10%	20%	40%	60%	Peningkatan Daya Serap IPTeKIN di Klaster Industri untuk meningkatkan efisiensi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan dasar, menengah atas/kejuruan dan perguruan tinggi serta memberi apresiasi inovasi dan Peningkatan peran relawan berinovasi secara inklusif	4.1	Pengembangan Budaya Inovasi di Klaster Industri Maritim, Perikanan dan Pariwisata	Belum adanya budaya industri hijau (green industry)	Program Industri serta perlindungan dan konservasi Sumber Daya	Pengembangan dan peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian dan perlindungan SDA	% capaian target	0%	10%	20%	40%	60%	Pengembangan Budaya Inovasi di Klaster Industri untuk mendukung terciptanya industri yang ramah lingkungan dan efisien	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. Memperkuat kerja sama dalam rangka meningkatkan keterpaduan pemajuan sistem inovasi di daerah.	5.1	Peningkatan hubungan sosial klaster industri dengan masyarakat	Belum ada hubungan yang kuat antar industri dengan masyarakat	Program peningkatan Sosial keterpaduan masyarakat dengan industri	Program Link and match industri masyarakat	% capaian target	0%	10%	20%	40%	60%	peningkatan Keterpaduan masyarakat industri significant	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	5.2	Peningkatan kerja sama antar klaster industri di daerah dengan daerah lain	Belum terbentuk jaringan klaster industri	Program keterpaduan jaringan antar klaster industri	Peningkatan kapasitas Program Peningkatan Pengolahan dan Penasaran Hasil	% capaian target	0%	10%	40%	80%	100%	Peningkatan jaringan dan keterpaduan klaster industri secara signifikan	
6. Menyelaraskan dengan perkembangan global terkait HKI dan lingkungan	6.1	Program pengembangan klaster industri berbasis lingkungan (green technology)	tingkat pencemaran industri yang tinggi	Program teknologi hijau	Pengendalian emisi dan pencemaran lingkungan	% capaian target	0%	10%	20%	80%	90%	terciptanya hijau	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	6.2	Program klaster industri yang berstandar internasional	kurangnya industri yang berstandar internasional	Program mutu internasional	Peningkatan kualitas produk dengan standar internasional	% capaian target	0%	5%	10%	40%	60%	produk internasional standard	

Pilar 3: Penguatan jaringan IPTEKIN ----> mengembangkan jaringan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan jaringan inovasi

Kerangka Kebijakan Inovasi	NO	SASARAN	KONDISI SAAT INI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						KONDISI YANG DIINGINKAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	2027			
1. Menata dan mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal dan perijinan	1	1.1	Peningkatan desiminasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian inovasi IPTEKIN	Desiminasi hasil litbangyasa masih lemah	Peningkatan program desiminasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian inovasi IPTEKIN	Pelaksanaan program desiminasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian inovasi IPTEKIN	Kegiatan desiminasi	1	2	2	2	2	Peningkatan program desiminasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian inovasi IPTEKIN	Bappelitbangda
								8	9	10	11	12		
								1	1	-	-	-		
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) /atau penelitian, pengembangan dan perkeayasaan (litbangyasa) dan kemampuan absorpsi industri, IKM, atau khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), untuk memenuhi kebutuhan IPTEKIN strategis.	2	2.1	Penyusunan jaringan Litbangyasa	belum disusun pusat jaringan informasi litbangyasa	Program Penyusunan Pusat Jaringan Informasi Litbangyasa	Pelaksanaan penyusunan pusat jaringan informasi litbangyasa	% capaian target	20%	40%	80%	100%	100%	Program Penyusunan Pusat Jaringan Informasi Litbangyasa	Bappelitbangda
								40%	60%	100%	100%	100%		
								20%	40%	80%	100%	100%		
3. Menumbuh kembangkan bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi hasil litbangyasa.	3	3.1	Terbangunnya Jaringan IPTEKIN yang menghubungkan antara pusat inovasi di kawasan inovasi dengan simpul-simpul pelayanan teknologi di kecamatan dan desa serta dengan simpul IPTEKIN di luar daerah, luar Provinsi dan luar negeri.	Promosi dan Kerjasama Perdagangan masih lemah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Perdagangan	Peningkatan Promosi dan Kerja sama Perdagangan	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas promosi	5	10	20	40	60	Peningkatan Promosi dan Kerja sama Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
								5	10	15	20	25		
								5	10	15	20	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan dasar, menengah, atas/kejuruan dan perguruan tinggi serta memberi apresiasi inovasi dan meningkatkan peran relawan berinovasi secara inklusif	4.1	Berkembangnya budaya berjejaring antara aktor inovasi.	Budaya berjejaring aktor belum terbangun	Program Peningkatan Jaringan Kerja sama antar aktor	Pelaksanaan program peningkatan jaringan Kerja sama antar aktor	% capaian target	20%	40%	80%	100%	100%	Program peningkatan jaringan Kerja sama antar aktor	Bappeltbangda
5. Memperkuat kerja sama dalam rangka meningkatkan keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah.	5.1	Terciptanya sarana prasarana pendukung industri yang handal	Sarana prasarana belum memadai	Program Pembangunan/ perbaikan sarana prasarana Kawasan	Pelaksanaan program pembangunan/ sarana perbaikan prasarana Kawasan	% capaian target	20%	40%	80%	100%	100%	Program Pembangunan/ perbaikan sarana prasarana Kawasan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
6. Menyelaraskan dengan perkembangan global terkait HKI dan lingkungan	6.1	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan belum terkendali	Program pengendalian pencemaran dan perusahaan lingkungan Hidup	Pengawasan dan pengendalian pencemaran Air, udara dan tanah	Jumlah industri yang diawasi	5	10	15	20	25	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusahaan lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
						% Jumlah industri yang mendapat penghargaan proper	5%	10%	15%	20%	40%		

Pilar 4: Penguatan Bisnis inovatif (teknopreneur) ----> mendorong perkembangan usaha-usaha inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya														
Kerangka Kebijakan Inovasi	NO	SASARAN	KONDISI SAAT INI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						KONDISI YANG DIINGINKAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	2027			
1. Menata dan mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya penanaman modal dan perijinan	1.1	Tersedianya dukungan pengembangan UMKM	Program dukungan pengembangan UMKM kurang	Program dukungan pengembangan UMKM	Pengembangan Unit Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan KUMKM	Jumlah unit pelayanan publik yang dikembangkan (paket)	8	9	10	11	12	Pengembangan UMKM yang mandiri	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
							5	10	20	40	60			
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) / atau penelitian, pengembangan dan perancangan (itbangyasa) dan kemampuan absorpsi industri, IKM, atau khususnya usaha mikro, kecil menengah (UMKM), untuk memenuhi kebutuhan IPTEKIN strategis.	2.1	Terbentuknya lembaga inkubator yang mendukung UMKM dan entrepreneur	Belum ada lembaga inkubator industri	Program pembentukan lembaga inkubator yang mendukung UMKM dan perkembangan entrepreneur	Fasilitasi pembentukan lembaga inkubator	% peningkatan anggota UMKM / IKM di inkubator	0%	5%	10%	15%	20%	Terbentuknya lembaga inkubator yang mendukung UMKM perkembangan entrepreneur	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
							2.2	Program peningkatan kapasitas SDM	Keahlian SDM masih rendah	Program Peningkatan Kapasitas SDM	Pelatihan pelaku IKM dan UMKM			% Jumlah tenaga terlatih
3. Menumbuh kembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan hasil litbangyasa.	2.3	Peningkatan kualitas kelembagaan membentuk unit usaha bersama	Kualitas kelembagaan unit usaha bersama masih lemah	Program peningkatan kualitas kelembagaan dengan membentuk unit usaha bersama	Pembentukan usaha kelompok bersama	Jumlah KUB	0	1	3	5	10	Program peningkatan kualitas kelembagaan dengan membentuk unit usaha bersama	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
							3.1	Program peningkatan inisiatif masyarakat dalam penerapan IPTEKIN dan ICT	Sistem pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah masih lemah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pengembangan forum stakeholder Koperasi dan UMKM			Jumlah stakeholder Koperasi dan UMKM peserta forum (stakeholder)
					Facilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi tentang formalisasi badan usaha UMKM	0	1	3	5	10			
					Facilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi tentang formalisasi badan usaha UMKM	0	1	3	5	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan dasar, menengah, atas/kejuruan dan perguruan tinggi serta memberi apresiasi inovasi dan meningkatkan peran relawan berinovasi secara inklusif	4.1	Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TTG dan ICT	Program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TTG dan ICT masih kurang	Program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan TTG dan ICT	Pemanfaatan dan penerapan TTG bekerjasama dengan PT	Peningkatan pusat layanan informasi teknologi (Posyantek) yang berfungsi (%)	10%	20%	30%	40%	60%	Peningkatan pemanfaatan dan penerapan TTG bekerja sama dengan PT	Dimas koperasi dan usaha mikro
	4.2	Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah baru masih kurang	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pendidikan kewirausahaan produktif dalam rangka pemyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru	Jumlah UMKM yang mengikuti pemyarakatan kewirausahaan, dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru	0	1	2	4	6	Peningkatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Dimas Koperasi dan Usaha Mikro
5. Memperkuat kerjasama dalam rangka meningkatkan keterampilan/pemajuan sistem inovasi di daerah.	5.1	Pemberdayaan usaha skala mikro	Pemberdayaan Usaha skala mikro masih kurang	Program Pemberdayaan Usaha skala Mikro	Pendidikan kewirausahaan melalui bimbingan teknis manajemen usaha dan kewirausahaan bagi usaha mikro	Jumlah usaha anggota koperasi yang difasilitasi melalui bimbingan teknis manajemen usaha (usaha mikro)	0	25	50	75	100	Pemberdayaan Usaha skala Mikro yang mandiri	Dimas Koperasi dan Usaha Mikro
					Penyediaan jaringan pendukung bagi usaha koperasi dan kemitraan usaha	Jumlah usaha anggota koperasi yang difasilitasi melalui bimbingan teknis manajemen usaha (usaha mikro)	0	10	25	40	50	Peningkatan kualitas produk UMKM berstandar nasional hingga internasional	Dimas Koperasi dan Usaha Mikro
6. Menyelaraskan dengan perkembangan global terkait HKI dan lingkungan	6.1	Peningkatan kualitas UMKM nasional hingga internasional	Minimnya kualitas produk UMKM berstandar nasional hingga internasional	Program peningkatan kualitas produk UMKM berstandar nasional hingga internasional	Pemberdayaan UMKM melalui Klinik Mutu	Jumlah UMKM yang memenuhi standar	0	1	2	4	6		

Pilar 5: Penguatan bidang IPTEKIN strategis daerah (Tematik) ----> meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/inovasi spesifik untuk memenuhi

Kerangka Kebijakan Inovasi	NO	SASARAN	KONDISI SAAT INI	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					KONDISI YANG DIINGINKAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	2027		
1. Menata dan mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal dan perijinan	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2023	2024	2025	2026	2027		
1.1	1.1	Pengembangan industri, pertanian, perikanan dan pariwisata berbasis IPTEKININ yang memiliki nilai kompetitif tinggi dan mandiri	Pengembangan industri maritim, pertanian, perikanan dan pariwisata berbasis IPTEKININ yang memiliki nilai kompetitif tinggi dan mandiri masih lemah	Pengembangan industri maritim melalui pembentukan technopark Pengembangan sistem agribisnis melalui Cooperatif Farming Pengembangan Minapolitan berwawasan lingkungan Pengembangan industri rakyat melalui teknologi rumah prisma Pengembangan wisata melalui tema ecowisata dan wisata hala	Pembangunan technopark industri maritim tradisional Jumlah kelompok tani menerapkan Cooperatif Farming Pembangunan mina politan berwawasan lingkungan Pengembangan tambak sistem rumah prisma	% peningkatan kapal rakyat % peningkatan petani sistem CF % peningkatan pendapatan nelayan % peningkatan pendapatan petambak garam	2%	4%	6%	7%	8%	Pengembangan industri maritim, pertanian, dan pariwisata berbasis IPTEKININ yang memiliki nilai kompetitif tinggi dan mandiri	Sekretaris Daerah
2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) /atau penelitian, pengembangan dan perkerjasama (litbang) dan kemampuan absorpsi industri, IKM, atau khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), untuk memenuhi kebutuhan IPTEKIN strategis.	2.1	Peningkatan Pengembangan industri maritim, pertanian, pariwisata berbasis IPTEKIN	Pengembangan industri maritim, pertanian, dan pariwisata berbasis IPTEKIN masih lemah	Program Peningkatan Pengembangan industri maritim, pertanian, dan pariwisata berbasis IPTEKIN	Facilitasi Pengembangan industri maritim, pertanian dan pariwisata	% Peningkatan jumlah kelompok usaha yang untuk berbasis IPTEKIN	0%	1%	3%	5%	10%	Peningkatan Pengembangan industri maritim, pertanian, dan pariwisata berbasis IPTEKIN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	2.2	Terciptanya interaksi kelembagaan dalam pengembangan teknologi/inovasi yang spesifik tematiknya.	Kurangnya interaksi kelembagaan dalam pengembangan dan pendayagunaan teknologi/ inovasi yang spesifik sesuai tematiknya	Program interaksi kelembagaan dalam pengembangan pendayagunaan teknologi / inovasi yang spesifik sesuai tematiknya	Pembentukan forum jaringan inovasi sesuai tematiknya Pembudayaan jaringan inovasi	Jumlah forum jaringan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi tema	0	1	1	2	2	Terciptanya interaksi kelembagaan dalam pengembangan dan pendayagunaan teknologi / inovasi yang spesifik sesuai tematiknya.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

3. Memumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi hasil litbangyasa.	2	3.1 Peningkatan kolaborasi inovasi dan bisnis melalui kerja sama sesuai pilar-pilar tematik yang ada.	4 Kolaborasi inovasi bisnis melalui kerja sama sesuai pilar-pilar tematik yang ada masih lemah	5 Program peningkatan kolaborasi inovasi dan bisnis melalui kerja sama sesuai pilar-pilar tematik yang ada.	6 Peningkatan penanganan hilirisasi, pasca panen dan pengolahan hasil	7 % Peningkatan hasil hilirisasi industri	8 0%	9 2%	10 4%	11 7%	12 10%	13 Peningkatan kolaborasi inovasi dan bisnis melalui kerja sama sesuai pilar-pilar tematik yang ada.	14 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Mendorong budaya inovasi di lingkungan pendidikan dasar, menengah, atas/kejuruan dan perguruan tinggi serta memberi apresiasi inovasi dan meningkatkan peran relawan berinovasi secara inklusif	4.1	Peningkatan pengembangan sumber daya pariwisata, dan pertanian semakin optimal melalui kerja sama tematik	Peningkatan dan pengembangan sumberdaya pariwisata, dan pertanian dan peningkatan semakin optimal melalui kerjasama tematik masih kurang	Program peningkatan dan pengembangan sumberdaya pariwisata, dan pertanian semakin optimal melalui kerjasama tematik	6 Peningkatan Pemasaran produk	7 % Peningkatan pemasaran produk industri	8 0%	9 3%	10 4%	11 7%	12 10%	13 Peningkatan dan pengembangan sumber daya pariwisata, dan pertanian semakin optimal melalui kerja sama tematik	Bappelitbangda
5. Memperkuat kerjasama dalam rangka meningkatkan keterpaduan pemayuan sistem inovasi di daerah.	5.1	Menyelaraskan Kebijakan daerah dan kerja sama dalam meningkatkan pengembangan pendayagunaan teknologi/inovasi yang spesifik sesuai tematik dengan daerah.	Penyelarasan Kebijakan daerah dan kerja sama dalam meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/inovasi yang spesifik sesuai tematik daerah masih lemah	Program penyelarasan Kebijakan daerah dan kerja sama dalam meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/inovasi yang spesifik sesuai dengan tematik daerah.	6 Peningkatan Pemasaran produk	7 % Peningkatan kerjasama antar daerah	8 0	9 1	10 1	11 2	12 2	13 Penyelesaian Kebijakan daerah dan kerja sama dalam meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi/inovasi yang spesifik sesuai dengan tematik daerah yang optimal	Bappelitbangda
6. Menyelaraskan dengan perkembangan global terkait HKI dan lingkungan	6.1	Peningkatan standar mutu produk pertanian, perikanan, dan industri maritim	Standar mutu produk pertanian, perikanan, dan industri masih rendah	Program peningkatan standar mutu produk pertanian, perikanan, dan industri maritim	6 Pengembangan kualitas dan mutu produk	7 % Peningkatan produk industri berstandar internasional	8 0%	9 5%	10 10%	11 15%	12 20%	13 Peningkatan standar mutu produk pertanian, perikanan, dan industri maritim	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1															
2	6.2	Peningkatan standard mutu pelayanan dan industri berwawasan lingkungan	Standard mutu pelayanan dan industri berwawasan lingkungan masih sedikit	Program peningkatan standard mutu pelayanan dan industri berwawasan lingkungan	Peningkatan Standar Mutu Pelayanan Industri	Jumlah industri yang bersertifikat memenuhi standard lingkungan internasional	0	2	4	6	10	Peningkatan standard mutu pelayanan dan industri berwawasan lingkungan	Dimas Perindustrian dan Perdagangan		


 Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 M. ROTIS
 NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 YUHRONUR EFENDI